

Judul : Banjir besar di Bali, perubahan iklim ancaman nyata
Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Banjir Besar Di Bali

Perubahan Iklim Ancaman Nyata



Ateng Sutisna

BANJIR besar yang melanda sejumlah kawasan di Bali awal September lalu kembali menegaskan bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata, bukan sekadar cerita bohong. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian besar, termasuk korban jiwa.

"Sejak dulu, banjir terjadi karena curah hujan tinggi yang debitnya tidak mampu tertampung atau dialirkan dengan baik ke laut. Bedanya sekarang, siklus hujan deras makin cepat. Itu menandakan perubahan iklim global memang nyata," kata anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menjelaskan, secara alami laut mampu menampung air hujan dalam jumlah besar. Namun, kenaikan suhu bumi, naiknya muka air laut, hingga banjir rob menjadi bukti perubahan iklim global yang tidak bisa diabaikan. Faktor lain seperti alih fungsi lahan, rusaknya daerah tangkapan air, dan buruknya pengelolaan sampah turut memperburuk kondisi.

"Faktor utamanya tetap perubahan iklim global. Solusinya, hentikan alih fungsi lahan bervegetasi, perbanyak catchment area, bersihkan jaringan drainase, dan lakukan mitigasi iklim secara serius," tegas politikus PKS ini.

Senada, anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik menyoro-

roti lemahnya tata kelola sampah yang memperparah banjir di Bali. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta memperkuat sistem peringatan dini banjir sekaligus membangun manajemen sampah nasional yang modern.

"Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah di daerah wisata seperti Bali memperburuk dampaknya. Pemerintah harus segera membangun sistem peringatan dini berbasis data BMKG, BPBD, dan KLHK agar lebih terintegrasi," ujar politikus Golkar itu.

Jamaludin bilang, kerugian akibat banjir tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga sosial-ekonomi. Di Bali, akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah merusak lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan memakan korban jiwa. Karena itu, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular harus jadi prioritas APBN 2026.

Ia mencontohkan pilot project pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan, Cilacap, yang berhasil mencapai zero waste melalui mesin insinerator dan 12 Unit Pelayanan Teknis (UPT). Bahkan, Pemkab Cilacap berencana mengirim sampah ke Nusakambangan untuk dikelola.

"Pemda bisa belajar dari Nusakambangan. Investasi bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah harus dipercepat. Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus reaktif menghadapi bencana," tegasnya.

Jamaludin menambahkan, DPR akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Termasuk, sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Sebelumnya, BNPB mencatat banjir Bali menewaskan 18 orang dan berdampak pada 6.309 kepala keluarga. ■ TIF